

TESIS

**IMPLIKASI YURIDIS INTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 9 TAHUN 2025 TERHADAP KEDUDUKAN NOTARIS**



Diajukan Oleh

ELSA SARI DEWI, S.H.

NIM.2420216320003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juni 2026**

**IMPLIKASI YURIDIS INTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 9 TAHUN 2025 TERHADAP KEDUDUKAN NOTARIS**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

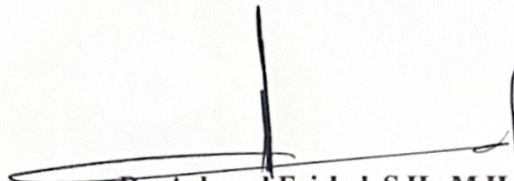
ELSA SARI DEWI, S.H.

NIM.2420216320003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juni 2026**

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Dihadapan Sidang Panitia Penguji
Pada Tanggal.....

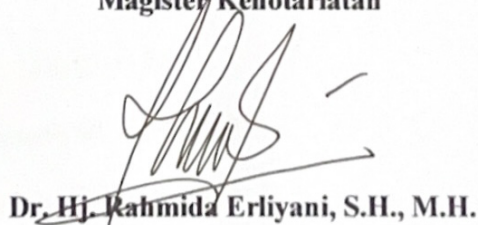
PEMBIMBING



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

**Tesis ini telah dipertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
Pada Tanggal**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H
Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elsa Sari Dewi, S.H

NIM : 2420216320003

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Implikasi Yuridis Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025
Terhadap Kedudukan Notaris

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Pada penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 10 Juni 2026

Yang membuat pernyataan

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown, featuring a signature in black ink over the central emblem and text. The banknote is yellow and green, with the number '10000' clearly visible. The signature appears to be 'Elsa Sari Dewi'.

Elsa Sari Dewi, S.H

NIM. 2420216320003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

**ELSA SARI DEWI
NIM. 2420216320003**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**IMPLIKASI YURIDIS INTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 9 TAHUN 2025 TERHADAP KEDUDUKAN NOTARIS**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 20%
sesuai dengan kriteria teloransi ≤ 20% dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 23 Juni 2026

Mengetahui
An. Dekan



*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

*Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002*

*Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001*

RINGKASAN

IMPLIKASI YURIDIS INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2025 TERHADAP KEDUDUKAN NOTARIS

Oleh

Elsa Sari Dewi¹, Achmad Faishal²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman

Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan secara atributif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, notaris bersifat mandiri dan tidak berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum perbuatan hukum perdata, termasuk pendirian koperasi. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menjadi dasar kebijakan program Koperasi Merah Putih menimbulkan pertanyaan normatif mengenai sejauh mana instrumen kebijakan tersebut berimplikasi terhadap kedudukan dan kewenangan notaris dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian difokuskan pada dua permasalahan pokok, yaitu kedudukan hukum Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan implikasi yuridisnya terhadap peran notaris, serta pengaruh kebijakan Koperasi Merah Putih terhadap kewenangan dan independensi notaris ditinjau dari asas legalitas, asas kepastian hukum, dan teori kewenangan atributif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden secara yuridis merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersifat internal administratif dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Oleh karena itu, Instruksi Presiden tidak memiliki daya ikat normatif terhadap masyarakat luas dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah, membatasi, maupun memengaruhi kewenangan atributif notaris.

¹ NIM: 2420216320003

² Pembimbing

Kewenangan notaris yang diberikan langsung oleh undang-undang bersifat melekat pada jabatan dan hanya dapat dimodifikasi melalui perubahan undang-undang, bukan melalui kebijakan administratif. Meskipun secara normatif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tidak mengubah kedudukan hukum notaris, penelitian ini menemukan adanya implikasi yuridis tidak langsung dalam tataran implementatif. Tekanan percepatan pembentukan koperasi berpotensi mendorong penyederhanaan prosedur pembuatan akta yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam UUJN. Selain itu, persepsi bahwa koperasi dalam program pemerintah memiliki legitimasi khusus dapat menimbulkan ketidakseragaman perlakuan hukum yang bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum. Potensi tekanan administratif tersebut juga berisiko menggeser posisi notaris dari pejabat umum yang independen menjadi pelaksana kebijakan administratif.

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan Koperasi Merah Putih harus ditempatkan sebagai instrumen koordinatif dalam ranah eksekutif semata, tanpa menyentuh substansi kewenangan jabatan notaris. Pemerintah perlu menegaskan batas yuridis Instruksi Presiden agar tidak ditafsirkan melampaui fungsinya. Notaris sebagai pejabat umum wajib mempertahankan independensi dan kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta, terlepas dari tekanan kebijakan yang berlaku. Apabila diperlukan perubahan terhadap peran atau kewenangan notaris dalam konteks program strategis nasional, hal tersebut harus ditempuh melalui jalur legislasi yang sah demi terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

IMPLIKASI YURIDIS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2025 TERHADAP KEDUDUKAN NOTARIS

Oleh:

Elsa Sari Dewi³, Achmad Faishal⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Instruksi Presiden, Notaris, Kewenangan Atributif, Koperasi Merah Putih, Asas Legalitas, Kepastian Hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 mengenai program Koperasi Merah Putih menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi yuridisnya terhadap kedudukan dan kewenangan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Inpres No. 9/2025 serta pengaruh kebijakan Koperasi Merah Putih terhadap kewenangan Notaris menurut UUJN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inpres No. 9/2025 merupakan instrumen kebijakan administratif (*beleidsregel*) yang berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga secara normatif tidak dapat mengubah atau membatasi kewenangan atributif Notaris yang bersumber dari undang-undang. Namun, secara implementatif, Inpres ini menimbulkan implikasi yuridis tidak langsung berupa potensi tekanan administratif dan penafsiran kebijakan yang dapat mengganggu independensi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kebijakan Koperasi Merah Putih berisiko menimbulkan inkonsistensi prosedur dan mengancam prinsip kepastian hukum serta persamaan di hadapan hukum jika dianggap memiliki legitimasi berbeda dari akta koperasi umum. Kesimpulannya, Inpres No. 9/2025 tidak memiliki daya ikat normatif terhadap kewenangan Notaris, tetapi batas antara kebijakan eksekutif dan kewenangan hukum harus dijaga ketat guna menjamin independensi jabatan Notaris. Disarankan agar pemerintah menegaskan batas fungsi Inpres sebagai instrumen koordinatif internal dan memastikan kebijakan tersebut tidak mengintervensi prosedur kenotariatan yang telah diatur oleh undang-undang demi menjaga kualitas akta autentik dan kepastian hukum.

³ NIM: 2420216320003

⁴ Pembimbing

**JURIDICAL IMPLICATIONS OF PRESIDENTIAL INSTRUCTION
NUMBER 9 OF 2025 ON THE POSITION OF NOTARIES**

By:

Elsa Sari Dewi⁵, Achmad Faishal⁶

Master of Notary Law, Lambung Mangkurat University, 109 pages

ABSTRACT

Keywords: Presidential Instruction, Notary, Attributive Authority, Red and White Cooperative, Principle of Legality, Legal Certainty.

A Notary is a public official authorized to make authentic deeds based on the Notary Profession Act (UUJN). The issuance of Presidential Instruction (Inpres) Number 9 of 2025 concerning the Koperasi Merah Putih (Red and White Cooperative) program raises questions about its juridical implications for the position and authority of Notaries. This research is aimed at analyzing the legal standing of Presidential Instruction Number 9 of 2025 and the influence of the Red and White Cooperative policy on Notary's authority according to the Notary Profession Act. This research employs a normative juridical (doctrinal) method using statute approach and conceptual approaches. The results indicate that Presidential Instruction Number 9 of 2025 is an administrative policy instrument (*beleidsregel*) outside the hierarchy of legislation and therefore it cannot normatively change or limit the attributive authority of the Notaries derived directly from statute. However, in implementation, this Presidential Instruction creates indirect juridical implications in the form of potential administrative pressure and policy interpretations that may interfere with a Notary's independence. The Koperasi Merah Putih policy also risks causing procedural inconsistencies and threatens the principles of legal certainty and equality before the law if its deeds are perceived to carry different legitimacy from those of the deeds of general cooperatives. In conclusion, Presidential Instruction Number 9 of 2025 has no normative binding power over Notary's authority, but the boundary between executive policy and legal authority must be strictly maintained to ensure the independence of the Notary position. It is recommended that the government clarify the functional limits of Presidential Instruction as an internal coordinative instrument and make sure that such policies do not intervene in the notarial procedures regulated in the legislation in order to safeguard the quality of authentic deeds and legal certainty.

Certified by,



¹ Student Number: 2420216320003

² Supervisor

HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN

MOTO

"This was the very first page, not where the story ends."
— Taylor Swift, *Enchanted*

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan sebagai ucapan ketulusan atas setiap doa, cintadan perjalanan Panjang yang mengiringi Langkah pada titik ini

1. Untuk Ayahanda tercinta, yang baru saja berpulang Alm. Selamat Arbain, dan Ibunda tersayang, Erma Wati, karya sederhana ini Ananda persembahkan sebagai wujud cinta, hormat, dan rasa terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang senantiasa mengiringi langkah Ananda. Terima kasih atas didikan dan bimbingan yang telah menghantarkan Ananda hingga mencapai titik ini. Untuk Ayahanda, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya. Untuk Ibunda, semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Semoga pencapaian ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi Ayah dan Ibu tercinta.
2. Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis, Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
3. Untuk sahabat dan orang-orang terdekat yang hadir dengan ketulusan, menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan perjalanan ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implikasi Yuridis Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terhadap Kedudukan Notaris”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan evaluasi, masukan, serta saran yang berharga guna penyempurnaan tesis ini.
3. Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan sebagai sekretaris penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
4. Ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
5. Seluruh **Dosen Pengajar dan Dosen Notaris** mata kuliah Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Segenap **Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan** Mangister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Banjarmasin;

7. Kedua Orang Tua tercinta, **Alm. Slamet Arbain** dan **Erma Wati**, yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, serta menjadi sumber kekuatan terbesar bagi Penulis dalam menjalani kehidupan;
8. Sahabat, rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan, serta seseorang yang memiliki arti khusus dalam kehidupan Penulis, atas segala dukungan, perhatian, kesabaran, dan semangat yang diberikan selama masa studi serta atas kehadirannya yang turut menjadi sumber kekuatan bagi Penulis hingga terselesaikannya Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih memiliki keterbatasan yang tidak terlepas dari kekurangan Penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang konstruktif akan diterima dengan penuh penghargaan sebagai upaya perbaikan dan pengembangan keilmuan di masa mendatang. Besar harapan Penulis agar Tesis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Kenotariatan.

Banjarmasin, 10 Juni 2026

Penulis



Elsa Sari Dewi, S.H

NIM. 2420216320003

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS.....	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penulisan.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II <u>KEDUDUKAN HUKUM DAN IMPLIKASI YURIDIS</u> INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2025 TERHADAP PERAN NOTARIS.....	32

A. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Kedudukan Instruksi Presiden	32
B. Sifat Hukum Instruksi Presiden: Analisis dari Perspektif Regeling, Beschikking, dan Beleidsregel	39
C. Tinjauan Yuridis Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025: Substansi, Dasar Pembentukan, dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Hukum Nasional	53
BAB III PENGARUH KEBIJAKAN KOPERASI MERAH PUTIH BERBASIS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2025 TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS.....	67
A. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang - Undang Jabatan Notaris	67
B. Pelaksanaan Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Hukum Kenotariatan.....	77
C. Pengaruh Kebijakan Koperasi Merah Putih terhadap Kewenangan dan Independensi Notaris Ditinjau dari Asas Legalitas dan Kepastian Hukum	89
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia	32
Tabel 2 Implikasi kebijakan Koperasi Merah Putih yang bersumber dari Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terhadap kewenangan notaris dapat dipetakan secara sistematis	99